



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 234 / KEP / HK / 2024**

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi oleh Panitia Penilai dan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 16/KEP/HK/2024, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B.3698/D-I/KPS.03.00/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 Penghargaan jaminan Sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, sebagai berikut :

a. Kategori Kabupaten/Kota :

1. Peringkat I : Pemerintah Daerah Kabupaten Belu;
2. Peringkat II : Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka;

Peringkat III

3. Peringkat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo.
- b. Kategori Perusahaan Skala Menengah Besar Sektor Jasa Keuangan :
 1. Peringkat I : PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
 2. Peringkat II : BPR Tanaoba Lais Manekat; dan
 3. Peringkat III : Koperasi Kredit Swasti Sari;
 - c. Kategori Perusahaan Skala Menengah Besar Sektor Jasa Pendidikan :
 1. Peringkat I : Yayasan Citra Bina Insan Mandiri;
 2. Peringkat II : Universitas Tribuana Kalabahi; dan
 3. Peringkat III : Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang.
 - d. Kategori Perusahaan Skala Menengah Besar Sektor Perdagangan dan Jasa :
 1. Peringkat I : Washeng Keke Mandiri;
 2. Peringkat II : Rumah Sakit Ibu dan Anak Leona; dan
 3. Peringkat III : Ciptalaku Lestari.
 - e. Kategori Perusahaan Skala Menengah Besar Sektor Pertambangan, Manufaktur dan Jasa Konstruksi :
 1. Peringkat I : PDAM Kabupaten Flores Timur;
 2. Peringkat II : PDAM Kabupaten Sikka; dan
 3. Peringkat III : Anugrah Nusantara Sejahtera.
 - f. Kategori Perusahaan Skala Menengah Besar Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan :
 1. Peringkat I : Matsyaraja Arnawa Stambhapura;
 2. Peringkat II : Asa Mutiara Nusantara; dan
 3. Peringkat III : Mitra Sinar Jaya.
 - g. Kategori Usaha Kecil Mikro
 1. Peringkat I : Usaha Timor Makmur;
 2. Peringkat II : La Moringa; dan
 3. Peringkat III : Nadus Tenun Atambua.
 - h. Kategori Pemerintah Desa
 1. Peringkat I : Desa Dualaus Kabupaten Belu;
 2. Peringkat II : Desa Tasinifu Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 3. Peringkat III : Desa Pukuafu Kabupaten Rote Ndao.

KETIGA

: Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta para nominator penghargaan diberikan Hadiah Piagam.

- KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Juli 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :**
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
 - 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
 - 3. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT di Kupang;
 - 4. Para Penerima Penghargaan masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

GLOSSARY PENILAIAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota			
A Coverage		Cakupan Kepesertaan di wilayah kerja Pemerintah Daerah	
1	Regulasi	Regulasi/Kebijakan tertulis dari Kepala Daerah yang terimplementasi dengan baik dan berdampak meningkatkan coverage kepesertaan	Regulasi spesifik yang terbit selama periode penilaian
2	Coverage Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja baik Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah yang telah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap data angkatan kerja	% Coverage = peserta PU & BPU BPJS Ketenagakerjaan/ Potensi = jumlah angkatan kerja sesuai BPS di wilayah kerjanya
3	Pertumbuhan Coverage	% Pertumbuhan Coverage PU dan BPU dari awal periode penilaian sampai akhir periode penilaian (Jan 2023 - Des 2023)	% Pertumbuhan = % Coverage Des 2023 - % Coverage Jan 2023
4	Kepesertaan Non ASN	Perlindungan Non ASN yang Meliputi : a) Honorer di seluruh SKPD/OPD Pemerintah Daerah b) Guru Honorer c) Penyelenggara Pemilu, d) Aparat Pemerintah Desa e) RT/RW	% Jumlah peserta Non ASN terhadap potensi pegawai Non ASN di lingkungan Pemda (Berdasarkan data BKD) '1) Bagi penilaian Provinsi wajib menghitung akumulasi Kabupaten/Kota -) Data kepesertaan Non ASN wajib ditanda tangani Sekretaris Daerah
B Inovasi			
5	Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem	Jumlah Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem melalui dukungan APBD Kab-Kota selama satu tahun termasuk pekerja rentan desa yang bersumber dari APBDes	Realisasi perlindungan pekerja rentan dibagi target zonasi
C Wawancara		Proses wawancara untuk mendalami komitmen dan inovasi kandidat	
6	Narasumber	Pejabat daerah yang hadir wawancara	Nilai masing-masing rating
10	Kepala Daerah	Cukup Jelas	
7.5	Wakil Kepala Daerah	Cukup Jelas	
2.5	Sekretaris Daerah	Cukup Jelas	
7	Materi dan Uji Pemahaman	Substansi materi dan uji pemahaman kandidat terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan	Hasil penilaian oleh Tim Penilai

GLOSSARY PENILAIAN BADAN USAHA

Kategori Badan Usaha				
A Kepatuhan				
1	Kepatuhan <i>Supply Chain</i>	% Tingkat kepatuhan <i>supply chain</i> yang meliputi induk, anak usaha, mitra kerja/vendor, tenant, jaringan distribusi, ekosistem/ukm binaan.	% Tingkat Kepatuhan x bobot Sesuai format yang disediakan	
2	Utilisasi Jamsostek Mobile	% Tingkat penggunaan JMO seluruh karyawan aktif badan usaha	Angka pada report utilisasi JMO x bobot	
B Inovasi				
3	Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR	CSR Pemberi Kerja untuk perlindungan pekerja rentan selama satu tahun Target Skala Besar 10.000 TK	(Realisasi pekerja rentan/target) x bobot	
4	Kontribusi Program SERTAKAN	Perlindungan Tenaga Kerja dalam program SERTAKAN melalui aplikasi JMO	Realisasi TK yang dilindungi / 20% jumlah TK Aktif dalam 1 PK/BU	
5	Perlindungan Mahasiswa KKN/Magang (Sektor Pendidikan)	Perlindungan mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau magang	Bukti Kepesertaan mahasiswa KKN/Magang dalam periode penilaian	
C Wawancara		Proses wawancara untuk mendalami komitmen dan inovasi kandidat		
6	Narasumber			
10	CEO/Direktur Utama/ Rektor/ Setara	Cukup Jelas	(rating/rating tertinggi) x bobot	
5	General Manager/Wakil Rektor/Setara	Cukup Jelas		
7	Materi dan Uji Pemahaman	Substansi materi dan uji pemahaman kandidat terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan	Hasil penilaian oleh Tim Penilai	

GLOSSARY PENILAIAN USAHA KECIL MIKRO

Usaha Kecil Mikro			
A	Kepatuhan		
	1	Utilisasi SIPP	Penggunaan SIPP oleh Usaha Kecil Mikro untuk meningkatkan strategi kemudahan kepesertaan dan pelayanan
	2	Pelaporan Upah (Tidak PDS Upah)	Pelaporan upah yang sebenarnya terhadap seluruh karyawan dari tingkat atas (CEO - Direksi) hingga tingkat bawah.
	3	Pendaftaran seluruh tenaga kerja (Tidak PDS TK)	Pemberi kerja telah mendaftarkan seluruh pekerjanya
B	Kesadaran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
	4	Keikutsertaan Program yang Diikuti	Paket program yang diikuti oleh UKM
	5	Periode Kepesertaan	Periode waktu UKM menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan

GLOSSARY PENILAIAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN				
A	Kepesertaan			
	1	Coverage Desa	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta dibanding jumlah angkatan kerja dalam satu desa/kelurahan	Realisasi tenaga kerja/potensi tenaga kerja dalam 1 desa/kelurahan
	2	Kepesertaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	-) RT/RW -) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) -) Karang Taruna -) Pos Pelayanan Terpadu -) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat -) Badan Kerjasama Antar Desa -) Badan Permusyawaratan Desa	Bukti Kepesertaan Aktif
	3	Keagenan Desa	Kepesertaan dan Produktivitas BUMDES	Bukti kepesertaan aktif BUMDES & Rekapitulasi produktivitas dalam periode penilaian
B	Inovasi			
	4	Perlindungan Pekerja Rentan Desa/Kelurahan	Jumlah pekerja rentan yang dilindungi oleh Pemerintah Desa melalui dana APBDes dalam satu tahun	Bukti kepesertaan pekerja rentan desa

FORM PENILAIAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

No	Indikator	Sub Indikator		Penjelasan	Bobot	Skor	Nilai	Ket
A	Coverage (60)	1	Regulasi	Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang terimplementasi	10		0	
		2	Coverage Kepesertaan	Jumlah pekerja formal dan informal yang terlindungi dari potensi pekerja by NIK di wilayah tertentu	25		0	
		3	Pertumbuhan Coverage	% Pertumbuhan Coverage selama periode penilaian	15		0	
		4	Coverage Kepesertaan Non ASN	% Perlindungan Pegawai Non ASN yang meliputi: a. Honorer Pemda/OPD/Kecamatan b. Guru Honorer c. Penyelenggara Pemilu d. Aparatur Desa e. RT/RW	10		0	
B	Inovasi (20)	5	Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem	Jumlah Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem melalui dukungan APBD Kabupaten/Kota selama satu tahun	20		0	
C	Wawancara (20)	6	Narasumber	1. Bupati/Walikota	10		0	
				2. Wakil Bupati/Wakil Walikota	7.5			
				3. Sekretaris Daerah	2.5			
		7	Materi dan Uji Pemahaman	Diskusi pemahaman substansi Jamsostek dan pendalaman inovasi	10		0	
TOTAL					100			

FORM PENILAIAN BADAN USAHA

Syarat Wajib

1. Bayar luran Tepat Bulan
2. Melaporkan Seluruh Tenaga Kerja termasuk BOD/BOC
3. Mengikuti Seluruh Program
4. Menggunakan SIPP
5. Memiliki PP/PKB
6. Merupakan perusahaan induk bukan anak/cabang

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating	Bobot	Skor	Nilai (Realisasi/ Target)x bobot	Ket
A	Komitmen Kepatuhan (40)	1	Kepatuhan <i>Supply Chain</i>	% Tingkat kepatuhan supply chain yang meliputi induk, anak usaha, mitra kerja/vendor, jaringan distribusi, ekosistem/ukm binaan dan CSR perusahaan.	20		0.00	
		2	Utilisasi Jamsostek Mobile (JMO)	% Tingkat penggunaan JMO seluruh karyawan badan usaha	20		0.00	
B	Inovasi (30)	3	Kontribusi Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR	CSR Perusahaan bagi perlindungan tenaga kerja rentan. <i>Target 10.000 TK</i>	20		0.00	
		4	Kontribusi Program SERTAKAN	Kontribusi Pemberi Kerja dalam program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) Target 20% dari TK Aktif	10		0.00	
C	Wawancara (30)	5	Narasumber	CEO/Direktur Utama/Direksi/Setara	10		0.00	-
				General Manager/Setara	5			
		6	Materi dan Uji Pemahaman	Penilaian Hasil Wawancara oleh Tim Penilai	20		0.00	-
TOTAL					100		0.00	

FORM PENILAIAN USAHA KECIL MIKRO

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating		Bobot	Skor	Nilai (rating/rating tertinggi x bobot)	Ket
1	Kepatuhan (65)	a	Utilisasi SIPP	1	Menggunakan SIPP	20		0.00	
				0	Tidak Menggunakan SIPP				
		b	Pelaporan Upah	1	Melaporkan upah sesungguhnya	20		0.00	
				0	Tidak melaporkan upah sesungguhnya				
		c	Pendaftaran seluruh tenaga kerja	1	Mendaftarkan seluruh tenaga kerja	25		0.00	
				0	Tidak mendaftarkan seluruh tenaga kerja				
2	Kesadaran Perlindungan Jaminan Sosial (35)	a	Keikutsertaan Program yang Diikuti	2	4 Program	25		0.00	
				1	Tidak 4 Program				
		b	Periode Kepesertaan	3	> 5 tahun	10		0.00	
				2	3 - 5 tahun				
				1	< 3 tahun				
		TOTAL						100	

FORM PENILAIAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating	Bobot	Skor	Nilai (rating/rating tertinggi x bobot)	Berkas Pendukung	
1	Kepesertaan (70)	a	Coverage Desa	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta dibanding jumlah angkatan kerja dalam satu desa/kelurahan		30		0.00	
		b	Kepesertaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	√	RT/RW	20		0.00	
				√	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
				√	Karang Taruna				
				√	Pos Pelayanan Terpadu				
				√	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				
				√	Badan Kerjasama Antar Desa				
				√	Badan Permusyawaratan Desa				
c	Keagenan Desa	√	Kepesertaan & Produktivitas BUMDES	20		0.00			
2	Inovasi (30)	Perlindungan Pekerja Rentan Desa	Jumlah pekerja rentan yang dilindungi oleh Pemerintah Desa melalui dana APBDes dalam satu tahun		30		0.00		
TOTAL					100		0.00		

PENILAIAN PEMKAB BELU

SEKTOR PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

No	Indikator	Sub Indikator		Penjelasan	Bobot	Skor	Nilai	Ket
A	Coverage (60)	1	Regulasi	Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang terimplementasi	10	3.50	3.50	Hasil Penilaian Regulasi Yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten Belu Berupa Surat Edaran Bupati yang bersifat umum dan disertai dukungan anggaran
		2	Coverage Kepesertaan	Jumlah pekerja formal dan informal yang terlindungi dari potensi pekerja by NIK di wilayah tertentu	25	64.18%	16.05	Persentasi Jumlah Peserta PU + BPU Tahun 2023 Di Wilayah Kabupaten Belu Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2023
		3	Pertumbuhan Coverage	% Pertumbuhan Coverage selama periode penilaian	15	9.35%	1.40	Persentasi (%) Coverage Desember 2023 dikurangi (%) Coverage Januari 2023
		4	Coverage Kepesertaan Non ASN	% Perlindungan Pegawai Non ASN yang meliputi: a. Honorer Pemda/OPD/Kecamatan b. Guru Honorer c. Penyelenggara Pemilu d. Aparatur Desa e. RT/RW	10	96.62%	9.66	Persentasi Jumlah peserta Non ASN terhadap potensi pegawai Non ASN di lingkungan Pemda
B	Inovasi (20)	5	Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem	Jumlah Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem melalui dukungan APBD Kabupaten/Kota selama satu tahun	20	18.00%	3.60	Realisasi Perlindungan Pekerja Rentan Dibagi Target Zonasi
C	Wawancara (20)	6	Narasumber	1. Bupati/Walikota	10	10	10.00	Bapak Bupati Belu Hadir Sebagai Narasumber
				2. Wakil Bupati/Wakil Walikota	7.5			
				3. Sekretaris Daerah	2.5			
		7	Materi dan Uji Pemahaman	Diskusi pemahaman substansi Jamsostek dan pendalaman inovasi	10	8.89	8.89	Hasil Penjumlahan 4 Orang Tim Penilai
TOTAL					100		53.10	

PENILAIAN PEMKAB SIKKA

SEKTOR PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

No	Indikator	Sub Indikator		Penjelasan	Bobot	Skor	Nilai	Ket
A	Coverage (60)	1	Regulasi	Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang terimplementasi	10	2.50	2.50	Hasil Penilaian Regulasi Yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sikka Berupa Peraturan Bupati yang bersifat umum dan tidak disertai dukungan anggaran
		2	Coverage Kepesertaan	Jumlah pekerja formal dan informal yang terlindungi dari potensi pekerja by NIK di wilayah tertentu	25	21.80%	5.45	Persentasi Jumlah Peserta PU + BPU Tahun 2023 Di Wilayah Kabupaten Sikka Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2023
		3	Pertumbuhan Coverage	% Pertumbuhan Coverage selama periode penilaian	15	2.87%	0.43	Persentasi (%) Coverage Desember 2023 dikurangi (%) Coverage Januari 2023
		4	Coverage Kepesertaan Non ASN	% Perlindungan Pegawai Non ASN yang meliputi: a. Honorer Pemda/OPD/Kecamatan b. Guru Honorer c. Penyelenggara Pemilu d. Aparatur Desa e. RT/RW	10	84.58%	8.46	Persentasi Jumlah peserta Non ASN terhadap potensi pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
B	Inovasi (20)	5	Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem	Jumlah Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem melalui dukungan APBD Kabupaten/Kota selama satu tahun	20	8.00%	1.60	Realisasi Perlindungan Pekerja Rentan Dibagi Target Zonasi
C	Wawancara (20)	6	Narasumber	1. Bupati/Walikota	10	10	10.00	Bapak Pj. Bupati Sikka Hadir Sebagai Narasumber
				2. Wakil Bupati/Wakil Walikota	7.5			
				3. Sekretaris Daerah	2.5			
		7	Materi dan Uji Pemahaman	Diskusi pemahaman substansi Jamsostek dan pendalaman inovasi	10	8.80	8.80	Hasil Penjumlahan 4 Orang Tim Penilai
TOTAL					100		37.24	

PENILAIAN PEMKAB NAGEKEO

No	Indikator	Sub Indikator		Penjelasan	Bobot	Skor	Nilai	Ket
A	Coverage (60)	1	Regulasi	Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang terimplementasi	10	2.50	2.50	Hasil Penilaian Regulasi Yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Berupa Peraturan Bupati yang bersifat umum dan tidak disertai dukungan anggaran
		2	Coverage Kepesertaan	Jumlah pekerja formal dan informal yang terlindungi dari potensi pekerja by NIK di wilayah tertentu	25	19.20%	4.80	Persentasi Jumlah Peserta PU + BPU Tahun 2023 Di Wilayah Kabupaten Nagekeo Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2023
		3	Pertumbuhan Coverage	% Pertumbuhan Coverage selama periode penilaian	15	5.62%	0.84	Persentasi (%) Coverage Desember 2023 dikurangi (%) Coverage Januari 2023
		4	Coverage Kepesertaan Non ASN	% Perlindungan Pegawai Non ASN yang meliputi: a. Honorer Pemda/OPD/Kecamatan b. Guru Honorer c. Penyelenggara Pemilu d. Aparatur Desa e. RT/RW	10	95.46%	9.55	Persentasi Jumlah peserta Non ASN terhadap potensi pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo
B	Inovasi (20)	5	Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem	Jumlah Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin/Pekerja Miskin Ekstrem melalui dukungan APBD Kabupaten/Kota selama satu tahun	20	0.00%	0.00	Realisasi Perlindungan Pekerja Rentan Dibagi Target Zonasi
C	Wawancara (20)	6	Narasumber	1. Bupati/Walikota	10	10	10.00	Bapak Pj. Bupati Nagekeo Hadir Sebagai Narasumber
				2. Wakil Bupati/Wakil Walikota	7.5			
				3. Sekretaris Daerah	2.5			
		7	Materi dan Uji Pemahaman	Diskusi pemahaman substansi Jamsostek dan pendalaman inovasi	10	8.17	8.17	Hasil Penjumlahan 4 Orang Tim Penilai
TOTAL					100		35.86	

PENILAIAN BANK NTT

JASA KEUANGAN

Syarat Wajib

1. Bayar luran Tepat Bulan
2. Melaporkan Seluruh Tenaga Kerja termasuk BOD/BOC
3. Mengikuti Seluruh Program
4. Menggunakan SIPP
5. Memiliki PP/PKB
6. Merupakan perusahaan induk bukan anak/cabang

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating	Bobot	Skor	Nilai (Realisasi/ Target)x bobot	Ket
A	Komitmen Kepatuhan (40)	1	Kepatuhan <i>Supply Chain</i>	% Tingkat kepatuhan supply chain yang meliputi induk, anak usaha, mitra kerja/vendor, jaringan distribusi, ekosistem/ukm binaan dan CSR perusahaan.	20	1	20.00	Seluruh Anak Perusahaan dan Mitra Kerja / Vendor Sudah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (3/3 = 1)
		2	Utilisasi Jamsostek Mobile (JMO)	% Tingkat penggunaan JMO seluruh karyawan badan usaha	20	52.14%	10.43	Total Pengguna JMO Di Bank NTT Sebesar 52.14 % (1.037/1989 = 52.14%)
B	Inovasi (30)	3	Kontribusi Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR	CSR Perusahaan bagi perlindungan tenaga kerja rentan. <i>Target 10.000 TK</i>	20	0.5	10.00	5.000 Tenaga Kerja didaftarkan melalui skema CSR (5.000 / 10.000 = 0.5)
		4	Kontribusi Program SERTAKAN	Kontribusi Pemberi Kerja dalam program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) Target 20% dari TK Aktif	10	0.003	0.03	Terdapat 1 Tenaga Kerja Bank NTT yang mendaftarkan 1 Orang Pekerja BPU melalui program sertakan pada aplikasi JMO (1/398 = 0.003)
C	Wawancara (30)	5	Narasumber	CEO/Direktur Utama/Direksi/Setara	10	5	5.00	Yang Hadir Setara Kepala Divisi
				General Manager/Setara	5			
		6	Materi dan Uji Pemahaman	Penilaian Hasil Wawancara oleh Tim Penilai	20	15.52	15.52	Hasil Penjumlahan Penilaian 4 Orang Tim Penilai
TOTAL					100		60.98	

PENILAIAN WASHENG KEKE MANDIRI

PERDAGANGAN
DAN JASA

Syarat Wajib

1. Bayar Iuran Tepat Bulan
2. Melaporkan Seluruh Tenaga Kerja termasuk BOD/BOC
3. Mengikuti Seluruh Program
4. Menggunakan SIPP
5. Memiliki PP/PKB
6. Merupakan perusahaan induk bukan anak/cabang

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating	Bobot	Skor	Nilai (Realisasi/ Target)x bobot	Ket
A	Komitmen Kepatuhan (40)	1	Kepatuhan <i>Supply Chain</i>	% Tingkat kepatuhan supply chain yang meliputi induk, anak usaha, mitra kerja/vendor, jaringan distribusi, ekosistem/ukm binaan dan CSR perusahaan.	20	1	20.00	Seluruh Anak Perusahaan dan Mitra Kerja / Vendor Sudah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (4/4 = 1)
		2	Utilisasi Jamsostek Mobile (JMO)	% Tingkat penggunaan JMO seluruh karyawan badan usaha	20	70.87%	14.17	Total Pengguna JMO Di Washeng Keke Mandiri Sebesar 70.87 %
B	Inovasi (30)	3	Kontribusi Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR	CSR Perusahaan bagi perlindungan tenaga kerja rentan. <i>Target 10.000 TK</i>	20	0	0.00	
		4	Kontribusi Program SERTAKAN	Kontribusi Pemberi Kerja dalam program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) Target 20% dari TK Aktif	10	0	0.00	
C	Wawancara (30)	5	Narasumber	CEO/Direktur Utama/Direksi/Setara	10	5	5.00	Yang Hadir Setara General Manager
				General Manager/Setara	5			
		6	Materi dan Uji Pemahaman	Penilaian Hasil Wawancara oleh Tim Penilai	20	16.94	16.94	Hasil Penjumlahan Penilaian 4 Orang Tim Penilai
TOTAL					100		56.11	

PENILAIAN PDAM KABUPATEN FLORES TIMUR

PERTAMBANGAN,
MANUFAKTUR DAN
JASA KONSTRUKSI

Syarat Wajib

1. Bayar iuran Tepat Bulan
2. Melaporkan Seluruh Tenaga Kerja termasuk BOD/BOC
3. Mengikuti Seluruh Program
4. Menggunakan SIPP
5. Memiliki PP/PKB
6. Merupakan perusahaan induk bukan anak/cabang

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating	Bobot	Skor	Nilai (Realisasi/ Target)x bobot	Ket
A	Komitmen Kepatuhan (40)	1	Kepatuhan <i>Supply Chain</i>	% Tingkat kepatuhan supply chain yang meliputi induk, anak usaha, mitra kerja/vendor, jaringan distribusi, ekosistem/ukm binaan dan CSR perusahaan.	20	1	20.00	Seluruh Anak Perusahaan dan Mitra Kerja / Vendor Sudah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (1/1 = 1)
		2	Utilisasi Jamsostek Mobile (JMO)	% Tingkat penggunaan JMO seluruh karyawan badan usaha	20	22.22%	4.44	Total Pengguna JMO Di PDAM Flores Timur Sebesar 22.22 %
B	Inovasi (30)	3	Kontribusi Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR	CSR Perusahaan bagi perlindungan tenaga kerja rentan. <i>Target 10.000 TK</i>	20	0	0.00	
		4	Kontribusi Program SERTAKAN	Kontribusi Pemberi Kerja dalam program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) Target 20% dari TK Aktif	10	0	0.00	
C	Wawancara (30)	5	Narasumber	CEO/Direktur Utama/Direksi/Setara	10	10	10.00	Yang Hadir Direktur Utama PDAM Flores Timur
				General Manager/Setara	5			
		6	Materi dan Uji Pemahaman	Penilaian Hasil Wawancara oleh Tim Penilai	20	15.08	15.08	Hasil Penjumlahan Penilaian 4 Orang Tim Penilai
TOTAL					100		49.52	

PENILAIAN MATSYARAJA ARNAWA STAMBHAPURA

Syarat Wajib

1. Bayar Iuran Tepat Bulan
2. Melaporkan Seluruh Tenaga Kerja termasuk BOD/BOC
3. Mengikuti Seluruh Program
4. Menggunakan SIPP
5. Memiliki PP/PKB
6. Merupakan perusahaan induk bukan anak/cabang

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating	Bobot	Skor	Nilai (Realisasi/ Target)x bobot	Ket
A	Komitmen Kepatuhan (40)	1	Kepatuhan <i>Supply Chain</i>	% Tingkat kepatuhan supply chain yang meliputi induk, anak usaha, mitra kerja/vendor, jaringan distribusi, ekosistem/ukm binaan dan CSR perusahaan.	20	1	20.00	Seluruh Anak Perusahaan dan Mitra Kerja / Vendor Sudah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (2/2 = 1)
		2	Utilisasi Jamsostek Mobile (JMO)	% Tingkat penggunaan JMO seluruh karyawan badan usaha	20	27.03%	5.41	Total Pengguna JMO Di Matsyaraja Arnawa Stambhapura Sebesar 27.03 %
B	Inovasi (30)	3	Kontribusi Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR	CSR Perusahaan bagi perlindungan tenaga kerja rentan. <i>Target 10.000 TK</i>	20	0	0.00	
		4	Kontribusi Program SERTAKAN	Kontribusi Pemberi Kerja dalam program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) Target 20% dari TK Aktif	10	0	0.00	
C	Wawancara (30)	5	Narasumber	CEO/Direktur Utama/Direksi/Setara	10	5	5.00	Yang Hadir Setara General Manager
				General Manager/Setara	5			
		6	Materi dan Uji Pemahaman	Penilaian Hasil Wawancara oleh Tim Penilai	20	14.98	14.98	Hasil Penjumlahan Penilaian 4 Orang Tim Penilai
TOTAL					100		45.39	

PENILAIAN CITRA BINA INSAN MANDIRI

JASA
PENDIDIKAN

Syarat Wajib

1. Bayar Iuran Tepat Bulan
2. Melaporkan Seluruh Tenaga Kerja termasuk BOD/BOC
3. Mengikuti Seluruh Program
4. Menggunakan SIPP
5. Memiliki PP/PKB
6. Merupakan perusahaan induk bukan anak/cabang

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating	Bobot	Skor	Nilai (Realisasi/ Target)x bobot	Ket
A	Komitmen Kepatuhan (40)	1	Kepatuhan <i>Supply Chain</i>	% Tingkat kepatuhan supply chain yang meliputi induk, anak usaha, mitra kerja/vendor, jaringan distribusi, ekosistem/ukm binaan dan CSR perusahaan.	20	1	20.00	Seluruh Anak Perusahaan dan Mitra Kerja / Vendor Sudah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (1/1 = 1)
		2	Utilisasi Jamsostek Mobile (JMO)	% Tingkat penggunaan JMO seluruh karyawan badan usaha	20	31.56%	6.31	Total Pengguna JMO Di Citra Bina Insan Mandiri Sebesar 31.56 %
B	Inovasi (30)	3	Kontribusi Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR	CSR Perusahaan bagi perlindungan tenaga kerja rentan. <i>Target 10.000 TK</i>	20	0.0063	0.13	Terdapat 63 Orang Pekerja BPU yang didaftarkan oleh Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Sebagai Bagian Dari CSR
		4	Kontribusi Program SERTAKAN	Kontribusi Pemberi Kerja dalam program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) Target 20% dari TK Aktif	10	0	0.00	
C	Wawancara (30)	5	Narasumber	CEO/Direktur Utama/Direksi/Setara	10	10	10.00	Yang Hadir Ketua Yayasan
				General Manager/Setara	5			
		6	Materi dan Uji Pemahaman	Penilaian Hasil Wawancara oleh Tim Penilai	20	16.19	16.19	Hasil Penjumlahan Penilaian 4 Orang Tim Penilai
TOTAL					100		52.63	

PENILAIAN USAHA TIMOR MAKMUR

USAHA
KECIL MIKRO

Syarat Wajib

-) Merupakan usaha produksi yang menampilkan ciri khas daerah
-) Merupakan usaha yang tepat diberi bantuan

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating		Bobot	Skor	Nilai (rating/rating tertinggi x bobot)	Ket
1	Kepatuhan (65)	a	Utilisasi SIPP	1	Menggunakan SIPP	20	1	20.00	
				0	Tidak Menggunakan SIPP				
		b	Pelaporan Upah	1	Melaporkan upah sesungguhnya	20	1	20.00	
				0	Tidak melaporkan upah sesungguhnya				
		c	Pendaftaran seluruh tenaga kerja	1	Mendaftarkan seluruh tenaga kerja	25	1	25.00	
				0	Tidak mendaftarkan seluruh tenaga kerja				
2	Kesadaran Perlindungan Jaminan Sosial (35)	a	Keikutsertaan Program yang Diikuti	2	4 Program	25	1	12.50	
				1	Tidak 4 Program				
		b	Periode Kepesertaan	3	> 5 tahun	10	3	10.00	
				2	3 - 5 tahun				
				1	< 3 tahun				
TOTAL						100		87.50	

PENILAIAN PEMERINTAH DESA DUALAUS

No	Indikator Penilaian	Uraian		Rating	Bobot	Skor	Nilai (rating/rating tertinggi x bobot)	Berkas Pendukung	
1	Kepesertaan (70)	a	Coverage Desa	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta dibanding jumlah angkatan kerja dalam satu desa/kelurahan		30	27.74%	8.32	
		b	Kepesertaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	√	RT/RW	20	7	20.00	
				√	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
				√	Karang Taruna				
				√	Pos Pelayanan Terpadu				
				√	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				
				√	Badan Kerjasama Antar Desa				
				√	Badan Permusyawaratan Desa				
		c	Keagenan Desa	√	Kepesertaan & Produktivitas BUMDES	20	0	0.00	
2	Inovasi (30)	Perlindungan Pekerja Rentan Desa	Jumlah pekerja rentan yang dilindungi oleh Pemerintah Desa melalui dana APBDes dalam satu tahun		30	1	30.00		
TOTAL					100		58.32		

TABULASI SEMENTARA PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023
KATEGORI PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA

NO	NAMA PEMERINTAH KAB / KOTA	REGULASI	COVERAGE KEPESEERTAAN	PERTUMBUHAN COVERAGE	COVERAGE KEPESEERTAAN NON ASN	PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN/PEKERJA MISKIN/PEKERJA MISKIN EKSTREM	SKOR SEMENTARA
1	BELU	3.50	16.04	1.40	9.66	3.60	34.21
2	TIMOR TENGAH UTARA	3.50	9.66	0.82	3.50	1.00	18.48
3	SIKKA	2.50	5.45	0.43	8.46	1.60	18.44
4	NAGEKEO	2.50	4.80	0.84	9.55	0.00	17.69
5	MANGGARAI BARAT	2.50	4.79	0.69	7.56	0.00	15.54
6	TIMOR TENGAH SELATAN	5.00	3.03	0.12	6.76	0.20	15.11
7	MANGGARAI TIMUR	8.50	3.44	0.33	2.15	0.60	15.02
8	ALOR	5.00	3.11	0.19	5.92	0.00	14.22
9	KOTA KUPANG	1.50	6.51	0.51	4.78	0.40	13.70
10	ENDE	2.50	4.14	-0.06	6.28	0.00	12.86
11	SUMBA TENGAH	2.50	2.73	0.24	6.80	0.00	12.28
12	SUMBA BARAT DAYA	2.50	2.72	0.57	6.38	0.00	12.18
13	SUMBA TIMUR	2.50	3.77	0.00	5.87	0.00	12.14
14	MANGGARAI	0.00	3.66	0.22	7.65	0.60	12.13
15	LEMBATA	0.00	3.38	0.63	8.02	0.00	12.02
16	SABU RAIJUA	5.00	2.53	0.56	3.70	0.00	11.79
17	NGADA	2.50	4.61	0.65	3.88	0.00	11.64
18	SUMBA BARAT	2.50	3.01	0.18	5.79	0.00	11.48
19	ROTE NDAO	0.00	3.69	1.31	4.56	0.80	10.35
20	KUPANG	0.00	3.00	0.28	3.25	0.20	6.74
21	FLORES TIMUR	0.00	2.78	0.16	0.04	0.00	2.99
22	MALAKA	0.00	0.33	0.06	1.56	0.00	1.95

TABULASI PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023
KATEGORI PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA

NO	NAMA PEMERINTAH KAB / KOTA	REGULASI	COVERAGE KEPESERTAAN	PERTUMBUHAN COVERAGE	COVERAGE KEPESERTAAN NON ASN	PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN/PEKERJA MISKIN/PEKERJA MISKIN EKSTREM	SKOR SEMENTARA	NARASUMBER	MATERI UJI PEMAHAMAN	TOTAL
1	BELU	3.50	16.04	1.40	9.66	3.60	34.21	10	8.90	53.10
2	SIKKA	2.50	5.45	0.43	8.46	1.60	18.44	10	8.80	37.24
3	NAGEKEO	2.50	4.80	0.84	9.55	0.00	17.69	10	8.17	35.86
4	TIMOR TENGAH UTARA	3.50	9.66	0.82	3.50	1.00	18.48	7.5	7.86	33.84
5	MANGGARAI TIMUR	8.50	3.44	0.33	2.15	0.60	15.02	10	8.64	33.66
6	TIMOR TENGAH SELATAN	5.00	3.03	0.12	6.76	0.20	15.11	10	8.35	33.46
7	MANGGARAI BARAT	2.50	4.79	0.69	7.56	0.00	15.54	10	7.83	33.37
8	KOTA KUPANG	1.50	6.51	0.51	4.78	0.40	13.70	1	8.23	22.93
9	ALOR	5.00	3.11	0.19	5.92	0.00	14.22	1	7.33	22.55
10	ENDE	2.50	4.14	-0.06	6.28	0.00	12.86	1	7.60	21.46
11	SUMBA BARAT DAYA	2.50	2.72	0.57	6.38	0.00	12.18	1	7.68	20.86
12	SUMBA TENGAH	2.50	2.73	0.24	6.80	0.00	12.28	0	0.00	12.28

TABULASI PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023
SEKTOR JASA KEUANGAN

NO	NAMA PEMBERI KERJA / BADAN USAHA	KEPATUHAN SUPPLY CHAIN	UTILISASI JMO	KONTRIBUSI PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN MELALUI SKEMA CSR	KONTRIBUSI PROGRAM SERTAKAN MELALUI JMO	SKOR SEMENTARA	NARA SUMBER	MATERI UJI PEMAHAMAN	TOTAL
1	BANK NTT	20	10.43	10	0.03	40.46	5.00	15.52	60.98
2	BPR TANAoba LAIS MANEKAT	20	6.42	0	0	26.42	10.00	16.95	53.37
3	KOPERASI KREDIT SWASTI SARI	20	4.79	0	0	24.79	10.00	16.18	50.97
4	KSP KOPDIT PINTU AIR	20	1.45	0	0	21.45	10.00	14.13	45.58
5	KOPERASI KREDIT CU KASIH SEJAHTERA	20	1.68	0	0	21.68	5.00	15.80	42.48
6	LINTAS BUANA JAYA	20	12.64	0	0	32.64			32.64

TABULASI PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023
SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA

NO	NAMA PEMBERI KERJA / BADAN USAHA	KEPATUHAN SUPPLY CHAIN	UTILISASI JMO	KONTRIBUSI PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN MELALUI SKEMA CSR	KONTRIBUSI PROGRAM SERTAKAN MELALUI JMO	SKOR SEMENTARA	NARA SUMBER	MATERI UJI PEMAHAMAN	TOTAL
1	WASHENG KEKE MANDIRI	20	14.17	0	0	34.17	5.00	16.94	56.11
2	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK LEONA	20	5.92	0	0	25.92	10.00	15.33	51.25
3	CIPTALAKU LESTARI	20	9.00	0	0	29.00	5.00	15.02	49.02
4	INDONESIA ADVENTURE SPORT	20	1.68	0	0	21.68	10.00	16.58	48.26
5	NAM TOKO	20	9.87	0	0	29.87			29.87
6	INTI HARUM SENTOSA	20	8.86	0	0	28.86			28.86

 : Tidak Hadir Dalam Proses Wawancara

TABULASI PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023
SEKTOR PERTAMBANGAN, MANUFAKTUR DAN JASA KONSTRUKSI

NO	NAMA PEMBERI KERJA / BADAN USAHA	KEPATUHAN SUPPLY CHAIN	UTILISASI JMO	KONTRIBUSI PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN MELALUI SKEMA CSR	KONTRIBUSI PROGRAM SERTAKAN MELALUI JMO	SKOR SEMENTARA	NARA SUMBER	MATERI UJI PEMAHAMAN	TOTAL
1	PDAM KABUPATEN FLORES TIMUR	20	4.44	0	0	24.44	10.00	15.08	49.52
2	PDAM KABUPATEN SIKKA	20	2.83	0	0	22.83	10.00	15.97	48.80
3	ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA	20	8.57	0	0	28.57	5.00	14.43	48.00
4	SEMEN KUPANG	20	3.61	0	0	23.61	5.00	16.22	44.83
5	BORNEO BAKERY & CAFÉ	20	2.38	0	0	22.38	5.00	15.12	42.50
6	PDAM WAE MBELILING	20	1.65	0	0	21.65			21.65

: Tidak Hadir Dalam Proses Wawancara

TABULASI PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023
SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN

NO	NAMA PEMBERI KERJA / BADAN USAHA	KEPATUHAN SUPPLY CHAIN	UTILISASI JMO	KONTRIBUSI PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN MELALUI SKEMA CSR	KONTRIBUSI PROGRAM SERTAKAN MELALUI JMO	SKOR SEMENTARA	NARA SUMBER	MATERI UJI PEMAHAMAN	TOTAL
1	MATSYARAJA ARNAWA STAMBHAPURA	20	5.41	0.00	0	25.41	5.00	14.98	45.39
2	ASAMUTIARA NUSANTARA	20	5.00	0.00	0	25.00	5.00	13.58	43.58
3	MITRA SINAR JAYA	20	8.16	0.00	0	28.16			28.16
4	MURIA SUMBA MANIS	20	6.65	0.00	0	26.65			26.65
5	MUTIARA ADONARA	20	3.25	0.00	0	23.25			23.25
6	TIMOR OTSUKI MUTIARA	20	2.53	0.69	0	23.22			23.22

 : Tidak Hadir Dalam Proses Wawancara

TABULASI PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023
SEKTOR JASA PENDIDIKAN

NO	NAMA PEMBERI KERJA / BADAN USAHA	KEPATUHAN SUPPLY CHAIN	UTILISASI JMO	KONTRIBUSI PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN MELALUI SKEMA CSR	KONTRIBUSI PROGRAM SERTAKAN MELALUI JMO	SKOR SEMENTARA	NARA SUMBER	MATERI UJI PEMAHAMAN	TOTAL
1	CITRA BINA INSAN MANDIRI	20	6.31	0.13	0	26.44	10.00	16.19	52.63
2	UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI	20	3.45	0.03	0	23.48	10.00	15.69	49.17
3	YAYASAN PENDIDIKAN KATHOLIK ARNOLDUS KUPANG	20	4.88	0.00	0	24.88	5.00	15.88	45.76
4	UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA	20	8.97	0.00	0	28.97			28.97
5	YAYASAN SEKOLAH UMAT KATHOLIK MANGGARAI BARAT (YASUKMABAR)	20	5.37	0.00	0	25.37			25.37
6	YAYASAN PENDIDIKAN ERNESTO	20	4.86	0.00	0	24.86			24.86

 : Tidak Hadir Dalam Proses Wawancara

TABULASI PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023
SEKTOR USAHA KECIL MIKRO

NO	NAMA PEMBERI KERJA / BADAN USAHA	MENGUNAKAN SIPP	MELAPORKAN UPAH SESUANGGUHNYA	PENDAFTARAN SELURUH TENAGA KERJA	KEPESERTAAN PROGRAM YANG DIKUTI	PERIODE KEPESERTAAN	SKOR AKHIR
1	USAHA TIMOR MAKMUR	20.00	20.00	25.00	12.50	10.00	87.50
2	LA MORINGA	20.00	20.00	25.00	12.50	6.67	84.17
3	NADUS TENUN ATAMBUA	20.00	20.00	25.00	12.50	6.67	84.17
4	DEPOT AROMA	0.00	20.00	25.00	12.50	10.00	67.50
5	DEPOT BAMBU KUNING	0.00	20.00	25.00	12.50	10.00	67.50
6	IBU SOEKIRAN	0.00	20.00	25.00	12.50	6.67	64.17

TABULASI PENILAIAN PARITRANA AWARD TAHUN 2023 KATEGORI PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

JUARA	KABUPATEN	NAMA DESA	COVERAGE DESA			Kepesertaan Lembaga			KEAGENAN DESA			PERLINDUNGAN			SKOR AKHIR
			Bobot	Skor	Nilai	Bobot	Skor	Nilai	Bobot	Skor	Nilai	Bobot	Skor	Nilai	
1	BELU	DUALAUS	30	27.74%	8.32	20	7	20	20	0	0	30	1	30	58.32
2	TIMOR TENGAH UTARA	TASINIFU	30	27.74%	8.32	20	6	17	20	0	0	30	1	30	55.47
3	ROTE NDAO	PUKUAFU	30	44.48%	13.35	20	2	6	20	0	0	30	1	30	49.06
4	TIMOR TENGAH SELATAN	NAILE'U	30	31.40%	9.42	20	3	9	20	0	0	30	1	30	47.99
5	BELU	KABUNA	30	20.81%	6.24	20	4	11	20	0	0	30	1	30	47.67
6	TIMOR TENGAH UTARA	PONU	30	60.61%	18.18	20	0	0	20	0	0	30	1	30	48.18



PARITRANA AWARD

Penghargaan Jaminan sosial ketenagakerjaan

Periode Penilaian Januari - Desember 2023

Agenda

Dasar Pelaksanaan & Arah Kebijakan Pemerintah

Highlight dan Inovasi Paritrana Award

Kriteria Penilaian Paritrana Award

Time Schedule dan How To Paritrana Award Tingkat Provinsi

Dasar Pelaksanaan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menko PMK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Keputusan Ketua Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tim Penilai Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023

Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi

Surat Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK selaku Ketua Panitia Tingkat Pusat Nomor B.3698/D-I/KPS.03.00/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*Paritrana Award*) Tahun 2024

Arah Kebijakan Pemerintah

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

78 TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

ASEAN INDONESIA 2023

FOKUS APBN TAHUN 2024

Rp660,8 triliun
Anggaran pendidikan (20% APBN) untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing.

Rp186,4 triliun
Anggaran kesehatan (5,6% APBN) untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif.

Rp493,5 triliun
Anggaran perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

Rp422,7 triliun
Anggaran infrastruktur untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan.

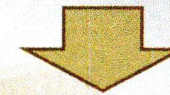
Rp180,8 triliun
Anggaran untuk mendukung strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan.

"Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, di antaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA). Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya."

**PIDATO PRESIDEN RI
PENYAMPAIAN RAPBN 2024
Rabu, 16 Agustus 2023**

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Gubernur & Bupati /Walikota

Mengambil langkah-langkah dan mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem melalui pendaftaran program jamsostek bagi pekerja miskin dan tidak mampu

Arah Kebijakan Pemerintah



Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Program Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem

Strategi pengurangan beban
pengeluaran masyarakat
diselenggarakan melalui
program bantuan sosial,
jaminan sosial, subsidi,
program stabilitas harga,
dan/atau program lainnya yang
dapat mengurangi beban
pengeluaran masyarakat



Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190 Tahun 2021 Jo. PMK Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Penanggulangan kemiskinan
ekstrem melalui penurunan
beban pengeluaran antara
lain : pemberian bantuan
sosial dan **jaminan sosial**
bagi masyarakat miskin, usia
lanjut dan difabel.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Jo Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024

- Penyelenggaraan Jaminan Sosial dilaksanakan dengan mempedomani **UU 40/2004, UU 24/2011, Perpres 109/2013 dan Inpres 02/2021.**
- **Pemda menganggarkan belanja iuran jamsostek dan mendaftarkan** pegawai non ASN dalam program BPJS Ketenagakerjaan.



Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Dalam hal terdapat selisih Dana Desa, dapat digunakan untuk **kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem** (Inpres 04/2022), atau **kegiatan prioritas lainnya** (Permendes PDTT 8/2022 dan Inpres 02/2021)

Definisi & Filosofi

Paritrana Award

Paritrana Award adalah apresiasi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha yang telah mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mewujudkan **Universal Coverage Jamsostek**

Paritrana diambil dari Bahasa Sansekerta yang artinya **Perlindungan**. **Piala Paritrana** merupakan mahakarya dari seniman kebanggaan tanah air Bapak I **Nyoman Nuarta** dengan desain khusus mengambil tema **"Perlindungan"**

Inisiasi penyelenggaraan **Paritrana Award** oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah terselenggara sejak tahun 2017. Saat ini memasuki **tahun ke-7 penyelenggaraan Paritrana Award**

Filosofi Paritrana Award adalah melahirkan *awareness* untuk memenuhi hak jaminan sosial setiap warga negara yang merupakan amanah konstitusi. Hak jaminan sosial adalah hak yang wajib dipenuhi oleh negara melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan *stakeholders* lain.

Jaminan sosial mampu menjaga martabat dan keberlangsungan hidup warga negara serta mencegah kemiskinan baru apabila terjadi risiko meninggal dunia ataupun kecelakaan kerja.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Mewujudkan ***Universal Coverage Jamsostek*** untuk menuju **keadilan dan kesejahteraan sosial**.

Tujuan

1. Meningkatkan ***awareness*** dan **peran aktif** Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa dalam **meningkatkan *coverage*** perlindungan jamsostek termasuk **melindungi pekerja miskin dan tidak mampu**.
2. Meningkatkan **kepatuhan dan kepedulian** Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap peraturan jamsostek dan pekerja rentan di sekitar.
3. Memperluas **kemanfaatan Jamsostek** untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kemiskinan baru

Peran BPJS Ketenagakerjaan

Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

- ✓ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- ✓ Memastikan keberlangsungan pendidikan anak Indonesia
- ✓ Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
- ✓ Bantalan sosial untuk mencegah kemiskinan

Kepesertaan

Peserta Aktif
40.310.149

Tahun 2023

Manfaat

Jumlah Klaim
3.883.690

Nominal Klaim
50,55 Triliun

Beasiswa
77 ribu anak & 332 Miliar

*Lebih dari 2 juta pekerja rentan terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan
dan 77.539 anak terlindungi pendidikan sampai Sarjana*



Inovasi & Kategori Penghargaan

Inovasi

1

Menambahkan Kategori Pemerintah Desa/Kelurahan

2

Menambah Sektor Badan Usaha

Kategori Penghargaan

Paritrana Award Tingkat Provinsi

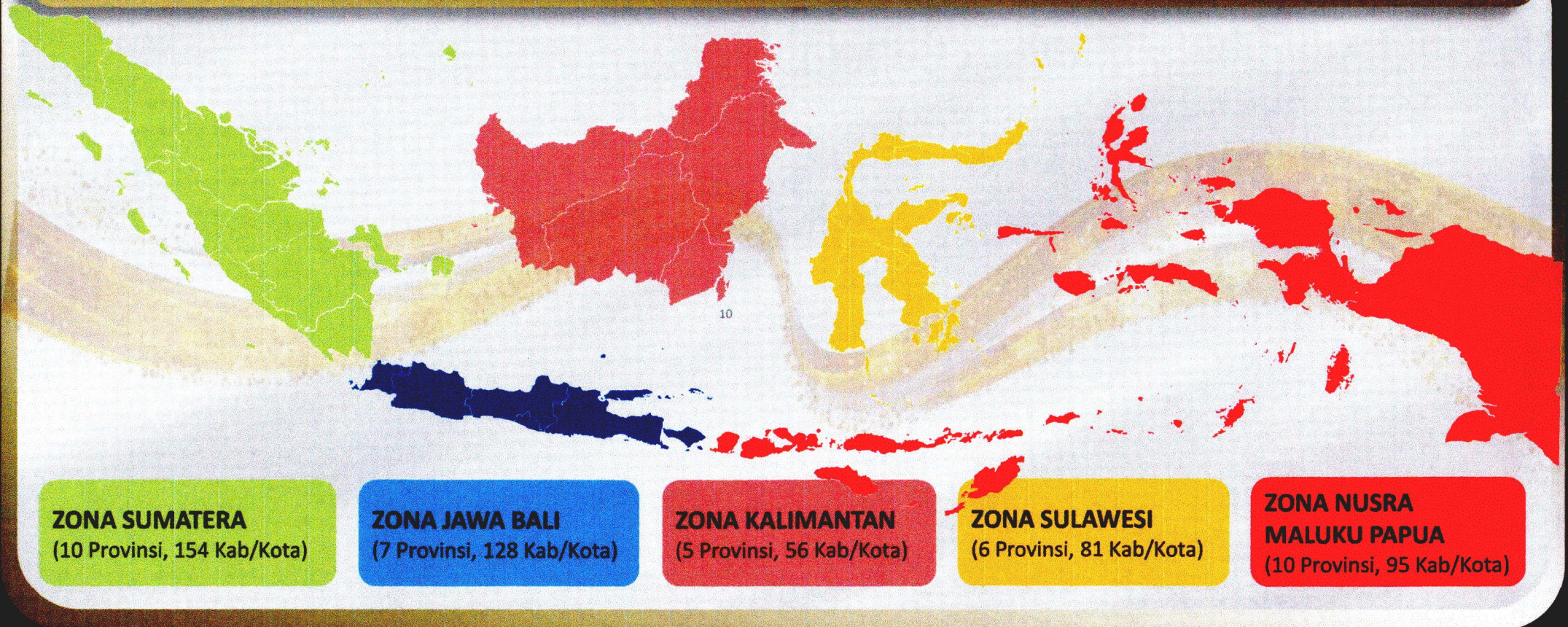
1. Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik I,II,III
2. Usaha terbaik sektor (5 sektor):
 - a. Keuangan
 - b. Perdagangan & Jasa
 - c. Pertambangan, Manufaktur & Konstruksi
 - d. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
 - e. Pendidikan
3. Usaha Kecil Mikro (UKM) terbaik I,II,III
4. Pemerintah Desa/Kelurahan terbaik I,II,III

Paritrana Award Tingkat Pusat

1. Penghargaan Khusus Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Perusahaan
2. Pemerintah Provinsi terbaik tiap zona
3. Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik tiap zona
4. Usaha terbaik sektor (5 sektor):
 - a. Keuangan
 - b. Perdagangan & Jasa
 - c. Pertambangan, Manufaktur & Konstruksi
 - d. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
 - e. Pendidikan
5. Usaha Kecil Mikro terbaik (UKM) 38 Provinsi
6. Pemerintah Desa/Kelurahan terbaik 38 Provinsi

Zonasi Pemerintah Daerah

Menerapkan sistem zonasi Pemerintah Daerah dibagi dalam 5 zona berdasarkan wilayah/kepulauan



Susunan Panitia Pusat – Provinsi dan Tim Penilai

Panitia Tingkat Pusat

Tim Pengarah:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsosnaker, Kemnaker RI
3. Direktur Jenderal Binwasnaker & K3, Kemnaker RI
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri RI
5. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan



**Prof. Dr. Ir. Nunung
Nuryartono, M.Si**
Ketua

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,
Kemenko PMK RI



Zainudin
Wakil Ketua
Direktur Kepesertaan,
BPJS Ketenagakerjaan

Anggota:

1. Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kemenko PMK
2. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnaker
3. Direktur Bina Pemeriksaan dan Norma Ketenagakerjaan, Kemnaker
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
5. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri

Panitia Tingkat Provinsi – (Tim 9)

Ketua

Sekretaris Daerah Provinsi

Sekretaris

Kepala Kantor Wilayah/Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Ibu Kota Provinsi

Anggota:

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Ketenagakerjaan
2. Unsur Pengusaha
3. Unsur Serikat Pekerja/Buruh
4. Ahli Jaminan Sosial
5. Ahli Ekonomi
6. Ahli Hukum
7. Ahli Kebijakan Publik

Tim Penilai Paritrana Award Tingkat Nasional



Ketua merangkap Anggota
**Dinna Prapto
Raharja, Ph.D.**
Ahli Kebijakan Publik



Sekretaris Tim Penilai
Muhyidin
Deputi Kepesertaan Korporasi
dan Institusi, BPJS
Ketenagakerjaan



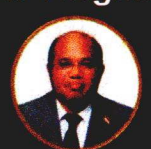
Anggota
Retna Pratiwi
Direktur Jamsostek,
Ditjen PHI - Kemnaker



Anggota
Horas Mauritz Panjaitan
Sekretaris Direktorat
Jenderal Bina Keuangan
Daerah, Kemendagri



Anggota
**Prof. Dr. Ir. D.S.
Priyarsono, M.Si**
Ahli Ekonomi



Anggota
**Dr. Chazali
Situmorang**
Ahli Jaminan Sosial



Anggota
Dr. Irine Handika,
SH., LL.M.
Ahli Hukum



Prof. Dr. Maman
Setiawan, S.E., M.T.
Ahli Ekonomi



Anggota
Prof. Drs. Soeprayitno,
M.B.A., M.Sc., Ph. D
Unsur Wakil Pengusaha



Anggota
Bibit Gunawan,
S.H., M.H.
Unsur Serikat Pekerja

Flow Paritrana Award Tingkat Provinsi

Kandidat

1. Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsinya
2. Badan Usaha (5 sektor)
3. Pemerintah Desa/Kelurahan
4. UKM

Tugas Panitia Tingkat Provinsi – Tim 9



1. Menyeleksi, menilai dan wawancara kandidat
2. Menetapkan Pemenang
3. Memberikan Penghargaan

Penghargaan Tingkat Provinsi

1. Juara I,II,III Kabupaten/Kota
2. Juara I,II,III Usaha tiap Sektor
3. Juara I, II, III Pemerintah Desa/Kelurahan
4. Juara I,II,III Usaha Kecil Mikro

Penyampaian kepada
Panitia Tingkat Pusat

Provinsi

Usaha Terbaik tiap Sektor

Pemerintah Desa/Kelurahan terbaik

Kab/Kota terbaik

Sektor Pendidikan terbaik

Usaha Kecil Mikro (UKM) terbaik

Flow Paritrana Award Tingkat Nasional

Kandidat

1. 38 Provinsi
2. 38 Kabupaten/Kota terbaik
3. 152 Usaha tiap sektor
4. 38 Sektor Pendidikan
5. 38 Pemerintah Desa/Kelurahan terbaik
6. 38 Usaha Kecil Mikro terbaik

Tugas Panitia Tingkat Pusat



1. **Menyiapkan kandidat wawancara:**
 - 2 Provinsi tiap zona (10)
 - 2 Kabupaten/Kota tiap zona (10)
 - 2 Usaha tiap Sektor (8)
 - 2 Sektor Pendidikan (2)
2. **Menetapkan Pemenang**
3. **Penganugerahan Paritrana Award oleh Presiden**

Penghargaan Tingkat Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Penerima Paritrana Award Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH DAERAH

KATEGORI	TAHUN					
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PENGHARGAAN KHUSUS	PROVINSI : SULAWESI UTARA KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN RAJA AMPAT		PROVINSI : SULAWESI UTARA BADAN USAHA : PT. BPD BALI			
PEMERINTAH PROVINSI	ZONA SUMATERA : JAMBI ZONA JAWA – BALI : BALI ZONA KALIMANTAN : KALIMANTAN TIMUR ZONA SULAWESI : SULAWESI SELATAN ZONA NUSRA MALUKU PAPUA : PAPUA BARAT	I. JAWA BARAT II. PAPUA BARAT III. DKI JAKARTA	I. DI YOGYAKARTA II. PAPUA BARAT III. SULAWESI UTARA	I. SULAWESI UTARA II. SULAWESI SELATAN III. PAPUA BARAT	I. JAWA TENGAH II. SUMATERA SELATAN III. KEP. BANGKA BELITUNG	I. JAWA TENGAH II. JAWA TIMUR III. DKI JAKARTA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	ZONA SUMATERA : KAB. KEP. ANAMBAS ZONA JAWA : KAB. TANGERANG ZONA KALIMANTAN : KAB. KUTAI KARTANEGARA ZONA SULAWESI : KAB. MOROWALI ZONA NUSRA MALUKU PAPUA : KOTA JAYAPURA	I. KAB. RAJA AMPAT II. KAB. JEMBER III. KOTA MANADO	I. KAB. RAJA AMPAT II. KOTA TANGERANG SELATAN III. KOTA BEKASI	I. KOTA CIMAHI II. KAB. SUKAMARA III. KAB. TAPANULI SELATAN	I. KOTA BITUNG II. KOTA TANJUNG PINANG III. KOTA MAKASSAR	I. KOTA SURAKARTA II. KAB. JEMBER III. KAB. SERANG

Penerima Paritrana Award Tahun 2017 - 2022

BADAN USAHA

KATEGORI	TAHUN					
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USAHA BESAR	- SEKTOR KEUANGAN, PERDAGANGAN & JASA : PT. BANK BPD JABAR & BANTEN - SEKTOR MANUFAKTUR, PERTAMBANGAN & MIGAS : PT. FONUSA AGUNG MULIA - SEKTOR PERKULBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN : PT. CIOMAS ADISATWA	I. PT. BANK BPD JABAR & BANTEN II. PT. BANK BPD JATIM III. PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk.	I. PT. KUALA PELABUHAN INDONESIA II. PT. BANK BPD SUMATERA BARAT III. KOPERASI KREDIT CU LANTANG TIPO	I. PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) II. PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING III. PT. BANK BPD BALI	I. THE MULIA RESORT & VILLAS BALI II. PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA III. PT. BENGKULU KARYA GUNA	I. PT. BANK CENTRAL ASIA II. PT. CHEVRO PACIFIC INDONESIA III. PT. BANK BPD BALI
USAHA MENENGAH	I. PT. SERA FOOD INDONESIA II. BPR SYARIAH BANGKA III. BPR TANA OBA LAIS MANEKAT	I. RSAB AISYIYAH BOJONEGORO II. PERUMDA BPR BANK YOGYA III. PT. KAPIT MAS BALI	I. PDAM TIRTA SEMBADA SLEMAN II. POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL III. RS. NAHDLATUL ULAMA TUBAN	I. PT. TWO IN ONE (AQUARIUS BOUTIQUE HOTEL) II. PT. KUNANGO JANTAN III. PT. PRALON	I. PT. PERTAMA PRECISION BINTAN II. PT. GRAHA BERNOWA III. PT. EWAN SUPERWOOD	I. PT. NIPPON INDOSARI CORPORINDO II. PT. ANEKA TAMBANG III. PT. MULTIJASA CEMERLANG
SEKTOR LAYANAN PUBLIK	KESEHATAN : RUMAH SAKIT SYAFIRA PEKANBARU PENDIDIKAN : UNIVERSITAS GADJAH MADA					

HADIAH PENERIMA PENGHARGAAN

PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI

Pemerintah Daerah

Badan Usaha

Usaha Kecil Mikro

Pemerintah Desa

Penerima Penghargaan Paritrana *Award* akan mendapatkan:

➤ Piagam Penghargaan
(tanda tangan Gubernur)

➤ Piagam Penghargaan
(tanda tangan Gubernur)

➤ Piagam Penghargaan
(tanda tangan Gubernur)

➤ Piagam Penghargaan
(tanda tangan Gubernur)

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL

Pemerintah Daerah

Badan Usaha

Usaha Kecil Mikro

Pemerintah Desa

Penerima Penghargaan Paritrana *Award* akan mendapatkan:

➤ Piagam Penghargaan
➤ Piala Paritrana

➤ Piagam Penghargaan
➤ Piala Paritrana

➤ Piagam Penghargaan
➤ Uang Pembinaan

➤ Piagam Penghargaan
➤ Uang Pembinaan

Kriteria Penilaian Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota

URAIAN KRITERIA

BOBOT

COVERAGE (60)

- | | | |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | Regulasi | 10 |
| 2 | Coverage Kepesertaan (PU & BPU) | 25 |
| 3 | Pertumbuhan Coverage | 15 |
| 4 | Coverage Kepesertaan Non ASN & Pemilu | 10 |

INOVASI (20)

- | | | |
|---|---|----|
| 5 | Perlindungan Pekerja Rentan/Pekerja Miskin Ekstrem
Target Zonasi | 20 |
|---|---|----|

WAWANCARA (20)

- | | | | |
|---|--|----|--|
| | Kehadiran Narasumber | | |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> Gubernur/Bupati/Walikota (10) Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota (7,5) Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (2,5) | 10 | |
| 7 | Materi dan Uji Pemahaman | 10 | |

Kriteria Penilaian Kategori Usaha

SYARAT WAJIB



1. Bayar Iuran Tepat Bulan
2. Melaporkan Seluruh Tenaga Kerja termasuk BOD/BOC
3. Mengikuti Seluruh Program

4. Menggunakan SIPP
5. Memiliki PP/PKB
6. Merupakan perusahaan induk bukan anak/cabang

KOMITMEN KEPATUHAN (40)

- | | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | Kepatuhan Supply Chain | 20 |
| 2 | Utilisasi Jamsostek Mobile (JMO) | 20 |

INOVASI (30)

- | | | |
|---|--|----|
| 3 | Kontribusi Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR
Target 10.000 TK selama satu tahun | 20 |
| 4 | Kontribusi Pemberi Kerja dalam program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) Target 20% dari TK Aktif | 10 |

WAWANCARA (30)

- | | | |
|----------------------|--|--|
| Kehadiran Narasumber | | |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • CEO/Direksi • General Manager | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (10) 10 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (5) </div> |
| 6 | Materi dan Uji Pemahaman | 20 |

Kriteria Penilaian

Kategori Sektor Pendidikan

SYARAT WAJIB



1. Bayar Iuran Tepat Bulan
2. Melaporkan Seluruh Tenaga Kerja

3. Mengikuti Seluruh Program
4. Menggunakan SIPP

KOMITMEN KEPATUHAN (40)

- | | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | Kepatuhan Supply Chain | 20 |
| 2 | Utilisasi Jamsostek Mobile (JMO) | 20 |

INOVASI (30)

- | | | |
|---|--|----|
| 3 | Kontribusi Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema CSR
Target 10.000 TK selama satu tahun | 10 |
| 4 | Kontribusi Pemberi Kerja dalam program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) Target 20% dari TK Aktif | 10 |
| 5 | Perlindungan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata / Magang | 10 |

WAWANCARA (30)

- | | | |
|----------------------|---------------------------|----|
| Kehadiran Narasumber | | |
| 6 | • Rektor (10) | 10 |
| | • Wakil Rektor/Setara (5) | |
| 7 | Materi dan Uji Pemahaman | 20 |

Kriteria Penilaian Kategori Usaha Kecil Mikro

SYARAT WAJIB



1. Merupakan **usaha produksi** yang menampilkan ciri khas daerah
2. Merupakan usaha yang **tepat diberi bantuan**
3. **NIK 100% valid**

KEPATUHAN (65)

- | | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | Utilisasi SIPP | 20 |
| 2 | Pelaporan Upah | 20 |
| 3 | Pendaftaran seluruh tenaga kerja | 25 |

Kesadaran Perlindungan Jaminan Sosial (35)

- | | | |
|---|------------------------------------|----|
| 4 | Keikutsertaan Program yang Diikuti | 25 |
| 5 | Periode Kepesertaan | 10 |

Kriteria Penilaian

Kategori Pemerintah Desa/Kelurahan

Setiap Provinsi menetapkan 1 Pemerintah Desa/Kelurahan terbaik sesuai kriteria penilaian

KEPESERTAAN (70)

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Coverage Kepesertaan | 30 |
| 2 | Kepesertaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan & Lembaga Desa/Kelurahan | 20 |
| 3 | Keagenan Desa (Kepesertaan dan Produktivitas BUMDES) | 20 |

INOVASI (30)

- | | | |
|---|----------------------------------|----|
| 4 | Perlindungan Pekerja Rentan Desa | 30 |
|---|----------------------------------|----|

Time Schedule Paritrana Award

Desember 2023	M II	• Penetapan Tim Penilai • Penetapan Indikator Penilaian	Maret 2024	M I	Penetapan Kandidat Wawancara
	M III	• Surat Edaran Ke Pemerintah Daerah • Sosialisasi Nasional		M II	Wawancara Kandidat oleh Tim Penilai Pusat
	M IV	• <i>Sosialisasi Tingkat Provinsi-Kabupaten/Kota</i> • Persiapan Penilaian Tingkat Provinsi		M III	
Januari 2024	M I	• Verifikasi dan Penilaian Tingkat Provinsi	April 2024	M IV	Rapat Pleno Hasil penilaian
	M II	• Wawancara Kandidat oleh Tim Penilai Provinsi (Tim 9)		M I	
	M III	Penganugerahan Paritrana <i>Award</i> Tingkat Provinsi		M II	(<i>Idul Fitri 1445 Hijriah</i>)
	M IV			M III	Penyampaian Surat Menko PMK kepada Presiden
Februari 2024	M I	Pengiriman hasil penilaian Panitia Tingkat Provinsi kepada Panitia Tingkat Pusat	Mei 2024	M IV	
	M II			M I	Penganugerahan oleh Presiden/Wakil Presiden
	M III	Verifikasi Penilaian Panitia Pusat		M II	
	M IV				



KEMNAKER



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan RI



Kementerian
Dalam Negeri RI



TERIMA KASIH